



Akuntan(Si) Pitung: Mendobrak Mitos Abnormalitas Dan Rasialisme Praktik Akuntansi

Ari Kamayanti

Politeknik Negeri Malang

kamayanti.ari@gmail.com

Informasi Artikel

Tanggal masuk	02-02-2017
Tanggal revisi	25-02-2017
Tanggal diterima	01-03-2017

Keywords:

Myth
Justice
Accounting
Intellectual Racism
Orientalism
Intellectual Genocide

Abstract

This article aims to explain and construct justice in accounting thought and practice, that is commonly filled with intellectual racism. This construction is carried out by employing redefinition (not to say deconstruction) of "normality". Redefinition is necessary to achieve justice as a concept that does not stand in mystical lever or rhetorics. Si Pitung, a Betawian Hero, is the right metaphor for redefinition process for two reasons. First, Si Pitung has been told as tales or urband legend with his actions to fight for justice. Second, Pitung's action, in essence, is a logical consequence for "normality" redefinition. At the end, the article suggests that accounting can be redefined as fight against in justice to break away from this myth by changing its assumptions. Through accounting, it is normal to accept changes, and abnormal to sustain status quo of reality.

Kata kunci:

Mitos
Keadilan
Akuntansi
Rasialisme Intelektual
Orientalisme
Genosida Intelektual

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan dan melakukan konstruksi atas aspek keadilan dalam praktik serta pemikiran akuntansi melalui birokrasi yang seringkali rasis dengan trah keilmuan. Konstruksi ini dilakukan melalui redefinisi (jika tidak mau menggunakan kata 'dekonstruksi') "normalitas". Redefinisi ini sangat dibutuhkan untuk mencapai keadilan, sebagai sebuah konsep, yang berada pada tataran mitos atau wacana. Si Pitung, pahlawan Betawi, adalah metafora yang tepat untuk proses redefinisi ini karena dua alasan. Pertama, kajian tentang si Pitung banyak menempatkan tokoh ini sebagai sebuah mitos-urban legend yang aksinya dilakukan untuk mendapatkan keadilan. Kedua, aksi si Pitung pada esensinya merupakan konsekuensi logis atas redefinisi 'normalitas'. Akhirnya, artikel ini mengusulkan sebuah perubahan asumsi atas normalitas akuntansi agar keadilan tidak menjadi sekadar mitos. Melalui akuntansi, menerima perubahan menuju perbaikan adalah hal yang normal, sedangkan mempertahankan keamanan kuasa tertentu/status quo adalah hal yang abnormal.

1. Pendahuluan

Saya ingin memulai artikel ini dengan sebuah pertanyaan: normalkah Anda?

Mungkin Anda membutuhkan beberapa menit untuk mencerna lalu menjawab pertanyaan tersebut. Namun dari pengalaman saya, jawaban yang semerta

terlontar disertai dengan kesungguhan pada raut wajah adalah “tentu saya normal”. Seakan menjadi tidak normal atau abnormal adalah sebuah dosa besar.

Baik, mari coba jawab pertanyaan selanjutnya: apa arti normal untuk Anda?

Jika untuk sementara, katakan saja, ‘normalitas’ adalah hal yang seharusnya dilakukan (atau yang benar), maka mungkin Anda bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah bangun pagi, sarapan, pergi ke kantor adalah hal yang normal? Apakah berdasar dan berjas saat ujian, bertoga saat wisuda, menggosip di waktu makan siang dengan teman adalah hal yang normal? Apakah memalsukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) demi kelancaran prosedur, atau mengada-adakan bukti agar borang penilaian diri menjadi baik adalah normal? Apakah PTN lebih baik daripada PTS adalah normal? Apakah “dunia ini tidak adil” juga sebuah pernyataan yang normal? Atau mari sedikit lebih “nakal” lagi: apakah pikiran anda tentang normalitas adalah hal yang normal? Jangan-jangan, konsep normalitas Anda terjebak pada sebuah doktrin definisi normalitas (Moore, 1966) yang telah bertahun-tahun menjadi *doxa* untuk membungkam kemanusiaan Anda!

Ya! Dalam pandangan Pierre Bourdieu, apa yang kita lakukan dalam sebuah sistem sosial, termasuk rentetan birokrasi, prosedur, bahkan pemikiran seperti tentu saja konsep ‘normalitas’, adalah sebuah reproduksi sistem yang digagas, ditanamkan oleh kaum dominan melalui para intelektualnya, dan dipastikan untuk dipraktikkan secara tidak sadar (*hence*, sebuah “*doxa*”) oleh masyarakat (Boyce 2008:280). Dengan memahami ini, maka definisi “normalitas” dan menjadi “normal” sebenarnya merupakan hasil akhir sebuah penjajahan ideologi. Jika kemudian ditarik ke akuntansi, maka praktik akuntansi yang tersaji dalam sebuah sistem, pemikiran, keilmuan, bahkan birokrasi juga merupakan penjajahan ideologi dominan.

Si Pitung, yang konon disebut sebuah mitos (cerita buatan) dan legenda, mampu melihat abnormalitas dari realitas yang dianggap oleh kebanyakan sebagai hal normal. Namanya terukir sebagai seorang jagoan sakti, muslim yang bertakwa, bahkan bandit (dalam pandangan rasis Belanda) yang tak takut melawan penjajah (Van Till, 1996). Ia menjadi simbol perlawanan dan kekuatan orang Betawi; sebuah simbol yang membentuk “normalitas” baru. Si Pitung adalah esensi dekonstruksi normalitas sehingga sangat cocok digunakan sebagai metafora dalam artikel ini.

Artikel ini bertujuan (1) menjelaskan bagaimana konsep normalitas merupakan bentuk penindasan cara pandang atas realitas dari segi keilmuan hingga mewujud pada praktik yang menempatkan ketidakadilan sebagai salah satu bagian dari normalitas (2) menegaskan bahwa akuntansi (konvensional) dibangun dengan premis serupa untuk memperkuat ketidakadilan, sehingga keadilan menjadi sebuah mitos, dan (3) mengusulkan perubahan cara pandang atas ‘normalitas’ melalui Si Pitung sebagai esensi pendobrakan atas normalitas.

Struktur artikel ini dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, pendedahan penjajahan konsep ‘normalitas’ ini akan disajikan melalui kaca mata positivisme *vis a vis* kaca mata kritis, posmodernis, dan religius. Pada bagian kedua, peran si Pitung dalam melakukan perubahan atas normalitas akan ditelusuri dari berbagai rekam sejarah. Akhirnya, bagian terakhir menyajikan usulan perubahan atas konsep normalitas yang memiliki konsekuensi logis pada pemikiran, praktik, hingga birokrasi akuntansi berbasis metafora si Pitung.

2. Kajian Teori

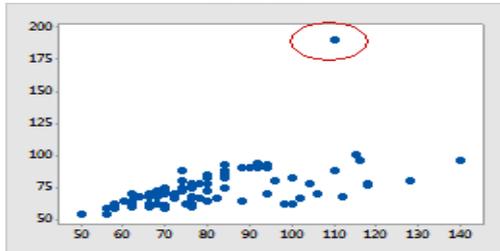
2.1 Penjara Normalitas

Ada berbagai paradigma dalam memandang realita. Burrell & Morgan (1979) menjelaskan bahwa paradigma dilandaskan pada dua asumsi: asumsi tentang ilmu pengetahuan (pada *continuum* subjektivitas-objektivitas), serta asumsi tentang realitas masyarakat (pada *continuum* keteraturan sosial/*status quo*-perubahan radikal/*radical change*). Paradigma yang sangat menekankan pada keteraturan dan pengukuran adalah paradigma Positivisme. Penekanan pada normalitas (keteraturan) dan pengukuran membuat penggunaan statistik menjadi sebuah kebutuhan.

Dalam perspektif ilmu statistik, hanya data yang normal saja yang bisa diproses. Yang disebut data normal adalah data dengan distribusi “normal” yaitu data dengan sebaran yang baik di mana jumlah data di atas dan di bawah rata-rata (*mean*) sama besar. Jika ada data yang tidak mengikuti sebaran normal sehingga menyimpang terlalu jauh dari sebaran data yang ada, atau disebut pula *outlier*, maka data ini dapat memengaruhi *error variance* dari apa yang hendak kita cari. *Outliers* harus di”obati” agar data kembali menjadi normal. Namun jika segala macam *treatment* atau transformasi data (misalnya dengan logaritma natural atau akar kuadrat) tak juga dapat mengobati *outlier* ini, maka cara yang paling tepat

adalah membuang *outlier* untuk meningkatkan tingkat generalisasi (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Outlier yang memengaruhi error variance



Sumber: <https://support.minitab.com>

Dalam rangka membuat suatu generalisasi atas kebenaran empiris, pembuangan *outliers* seperti ini menjadi sangat penting. Misalnya saja, jika terkumpul data belanja bulanan 10 pegawai negeri kepangkatan IID dan dirata-ratakan bahwa belanja mereka adalah Rp25.000.000 setiap bulannya, hal ini tentu akan mencengangkan. Generalisasi bahwa belanja bulanan pegawai negeri kepangkatan IID adalah Rp25.000.000 menjadi bias saat ternyata diketahui salah satu dari 10 orang tersebut baru memenangkan lotere sehingga membelanjakan jauh lebih banyak daripada rekan-rekannya. Jika hanya 9 pegawai yang tidak memenangkan lotere dirata-rata belanja bulannya, maka rata-rata yang didapat adalah Rp2.000.000. Dapat disimpulkan bahwa satu *outlier* ini harus dikeluarkan dari analisis data karena mengganggu generalisasi.

Dalam kajian kritis, posmodern atau non positivisme secara umum, “normalitas” ini dianggap menjadi sebuah pemaksaan, karena dua alasan. Pertama, hasil penelitian empiris positivis semacam ini telah menegasikan data-data *outliers* yang bisa jadi tidak kalah penting. Dengan tidak memasukkan data tersebut, bagaimana mungkin seseorang dapat mengklaim bahwa ilmu yang dihasilkan adalah ilmu yang “sebenarnya” jika kebenaran telah diseleksi atas nama pengukuhan *status quo*? Posmodernisme bahkan menolak adanya penunggalan atas kebenaran, termasuk apa yang disebut sebagai normalitas dalam kerangka modernism. Mereka menolak normalitas yang sangat berbasis pada empirisisme dan rasionalisme, sehingga melakukan relativitas atas kebenaran.

“To Olson, western culture willfully closes itself against true experience, against life’s authenticity, because of its orientation on (originally Greek) rationalism, with its obsessive and relentless

intellectualization of all human experience.” (Bertens, 2005:20)

Kedua, konsekuensi dari hasil pembentukan ilmu sedemikian akhirnya mengarah ke pembentukan pemikiran dan bahkan realitas. Jika studi empiris mengatakan bahwa (kebanyakan) manusia oportunistis dan pragmatis, sebagaimana gagasan *“The Nature of Man”* (Jensen & Meckling, 1998) dan kemudian itu dianggap benar, maka ilmu akan dibentuk pada premis yang sama. Akibatnya, bisa kita lihat, bahwa akuntansipun akhirnya dibangun untuk mengakomodasi sifat oportunistis-kapitalis manusia (Yamey, 1949); dan saat itu diajarkan maka terbentuklah manusia-manusia dengan mentalitas dan rasionalitas yang sama. Ini merupakan *self-fulfilling prophecies* (Feraro, et al., 2005).

Dalam Islam, penegasan tauhid yang dimulai dengan *“Laa”* (dari laa illah ha illallaah- tiada tuhan selain Allah) sebenarnya mengindikasikan bahwa selamanya Islam adalah agama oposisi. Oposisi ini akan selalu muncul karena selalu akan ada jurang antara idealisme dengan praktik ketidakadilan. Jadi, dalam perspektif ini, ketidakadilan bukanlah hal yang “normal”, mempertahankan *status quo* bukanlah hal yang “normal”; yang normal adalah perbaikan dan perubahan terus menerus untuk menghapus ketidakadilan. Oleh karena itu, normalitas empirisme positivis menjadi suatu hal yang sebenarnya menyalahi fitrah realitas. Apalagi keberanian positivisme untuk menegasikan Tuhan sebagaimana yang ditegaskan oleh Bapak Positivisme sendiri, bahwa percaya pada Tuhan adalah tahapan manusia primitif! (Comte, 1896:29):

“Thus between the necessity of observing facts in order to form a theory, and having a theory to observe facts, the human mind would have been entangled in a vicious circle, but for the natural opening afforded by the Theological conceptions. This is the fundamental for the theological character of primitive philosophy.”

Lebih menarik lagi, normalitas ilmu empiris positif menggunakan asas falsifikasi yang menempatkan *Grand Theory* sebagai basis kebenaran yang dibuktikan kebenaran melalui data empiris di waktu dan tempat yang berbeda (baca: Barat). Sebutkan saja teori yang Anda pahami digunakan di ilmu akuntansi, lalu sebutkan mana dari sekian teori tersebut yang dihasilkan dari tanah negeri sendiri. Saya teringat kritikan tajam Glaser & Strauss (1967, 4) pada para positivis yang tergantung pada teori, namun tidak bisa menghasilkan teori:

“So often in journals we read a highly empirical studies which at its conclusion has a tacked-on explanation taken from a logically deduced theory... [the author] uses this strategy because he has not been trained to generate a theory from the data he is reporting... He does this also because he has been trained only to research and verify his facts, not also to generate and his explanation of them.”

Dalam hal ini Lyotard, Bennington, & Massumi (1984, xxiii) menegaskan bahwa “science does not restrict itself to stating useful regularities and seek the truth, it is obliged to legitimate the rules of its own game, it then produces discourse of legitimation...”. Artinya, penelitian semacam ini digunakan untuk mengukuhkan/melegitimasi kembali kebenaran yang sebelumnya telah disampaikan.

(Mungkin) pendidikan juga berkontribusi atas ketidakmampuan akademisi dalam menghargai nilai-nilai yang ia miliki, sehingga normalitas keilmuan yang dianut harus mengekor pada Barat. Menggelikan pula untuk mencatat bahwa terdapat kecenderungan yang besar untuk mengakui “normalitas” Barat sebagai normalitas universal, sehingga di Negara Non-Barat, termasuk Indonesia tentunya, rasialisme intelektualitas pun terjadi bahkan di kalangan (akuntan) pribumi. Hal ini dikarenakan normalitas Barat sudah mendarah-daging dengan tidak hanya gaya hidup namun cara berpikir:

Western life style became very common in non-Western countries, especially in the ruling classes. The imitation of the West became almost a national behaviour... National culture everywhere in the Third World is split between two antagonistic tendencies. Each is presenting itself as the true representative of the people, the first in the name of Modernity, the second in the name of Tradition (Hanafi, 2008, 261)

Saya tidak membicarakan tentang ras hitam atau putih dalam kehidupan akademik seperti yang pernah ditulis oleh Ward Randolph & Weems (2010). Rasialisme didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai prasangka atas adalah keturunan bangsa. Dalam artikel ini, rasialisme diekstensikan menjadi rasialisme intelektualitas yaitu keturunan kelahiran pemikiran dan institusional, bukan keturunan kelahiran fisik/genetika biologis. Dengan cara pandang normalitas generalisasi, maka pemikiran *non-mainstream* apalagi dari institusi *non-mainstream* merupakan data *outlier* yang, karena tidak mungkin diobati akibat sifat kualitatifnya yang idealis, ideologis, dan kritis, harus dipinggirkan dan jika perlu dibuang dari sistem mapan. Saya tidak hanya pula

bicara tentang akuntansi *non mainstream* versus akuntansi *mainstream*. Dalam tataran yang lebih sempit, rasialisme ini pun terjadi dalam setiap golongan tersebut atas trah genetika pemikiran dan institusi. Jikalau pun kaum minoritas terakomodasi dalam sistem yang menganut prinsip pluralitas, maka pluralitas pun harus dalam desain kekuasaan¹. Pluralitas pada akhirnya hanya menjadi alih-alih toleransi yang dibungkus rasialisme intelektualitas atau *academic racism* sebagai “a new and lasting articulation of social practices, academic doctrines, and political movement” (Balibar, 2007, p. 82). Ini merupakan bentuk baru rasialisme/*neo-racism*. Balibar (2007) melanjutkan bahwa fenomena ini disebut oleh Nietzsche sebagai *politics of the feeble-minded* (politik para kaum lemah pikiran) yang dijalankan karena ketakutan akan perubahan dominasi pemikiran. Lagi, pada akhirnya gelagat ini semua masuk dalam konteks normalitas sempit tentang kemapanaan, dan bukannya perubahan.

Bagaimana politik para kaum lemah pikiran atau *academic racism* ini dilakukan? Tentu saja melalui birokrasi yang mengukuhkan keberadaan normalitas. Melalui birokrasi, manusia direduksi menjadi mesin-mesin berbasis fungsionalitas.

“The term itself suggests the rule of the “bureau”, of the apparatus, of something impersonal and hostile, which has assumed life and reigns over human beings. In common parlance, we also speak about the life-less bureaucrats, about the men who form that mechanism. The human beings that administer the State look as if they were lifeless, as if they were mere cogs in the machine. In other words, we are confronted here in the most condensed, in the most intensive form with the reification of relationships between human beings, with the appearance of life in mechanisms, in things... State and bureaucracy are seen as the very embodiment of all evil in human society” (Deutscher, 1969, 10–11).

Melalui kuasa dan otoritas struktural, peminggiran ide dan pembunuhan keturunan “kotor” lebih mudah untuk dijalankan. Hanya melalui birokrasilah genosida intelektual akhirnya dipandang “normal”. Atas nama struktur objektif, konsep keadilan pun dibangun. Kita sudah tidak perlu membicarakan kemanusiaan serta nilai-nilai yang

¹ Kamayanti (2012) menemukan dari hasil wawancara dengan salah satu penggagas SNA, bahwa riset akuntansi kualitatif “...kami beri tempat”. Pernyataan ini menegaskan keberadaan pluralitas dalam desain pemegang kekuasaan.

melekat pada manusia. Kita cukup melihat fungsi manusia dalam sistem “normal”. Jika manusia mengganggu fungsionalitas sistem, sebagaimana *outlier*, manusia perlu diganti dengan yang mau mengikuti sistem. Oleh karena itu pula (Deutscher, 1969) beranggapan bahwa birokrasi adalah perwujudan kejahatan (*evil*) itu sendiri.

Jadi, pada akhirnya normalitas dan menjadi normal adalah suatu penjara bagi mereka yang menolak masuk pada rentang mayoritas. Lebih menarik lagi untuk dicermati, bahwa perubahan besar dunia justru terletak pada orang-orang di luar batas normalitas; mereka adalah para *outliers* (Gladwell, 2008). Tidak akan ada proklamasi kemerdekaan jika Soekarno berpikiran seperti mayoritas yang tunduk pada kuasa penjajah. Tidak akan ada bohlam lampu, jika Thomas Alfa Edison memutuskan untuk berhenti setelah 1000 kali percobaannya gagal, di mana orang normal (mungkin) akan berhenti berusaha pada percobaan ke sepuluh. Tidak akan ada pesawat terbang jika Wright bersaudara berpikir seperti orang “normal” bahwa manusia tidak bisa terbang. Tidak ada Islam, apabila tidak ada nabi Muhammad SAW, manusia *outlier* di jamannya yang meninggalkan kerajaan bisnisnya untuk memenuhi panggilan Allah SWT untuk berdakwah.

Jadi, jika *outliers* yang tidak ‘normal’ telah menjadi jalan menuju perubahan kebaikan dan emansipasi, mengapa banyak dari kita yang begitu bangga menjadi orang-orang normal (atas dasar “normalitas” yang dibentuk universalitas Barat)?

Mengapa lebih banyak dari kita yang menolak bahkan menutup diri dari pemikiran dan praktik akuntansi yang “abnormal” jika mungkin bisa jadi itu adalah jalan menuju peradaban yang lebih baik?

3. Metode Penelitian

3.1 Si Pitung Sang *Outlier* Emansipator “Normalitas”

Salah satu kajian tentang si Pitung yang cukup termasyhur adalah karya Van Till (1996) dari Belanda. Ironis memang, bahwa banyak fakta yang mendukung keberadaan akademisi asing yang lebih peduli atas budaya Indonesia, setelah Clifford Geertz serta Thomas Stamford Raffles dengan Jawa, dan Skeley Lulofs dengan Tjut Njak Dhien dari Aceh. Ya, mungkin ini adalah refleksi pula atas mental orientalisme yang kita miliki. Orientalisme adalah sikap Barat terhadap Timur, yang menganggap Barat lebih superior dibandingkan Timur. Bagi Barat, Timur primitif sehingga harus di-beradab-kan

sebagaimana Barat (Said, 2003). Bagi orang Barat, menjadi “normal” untuk menganggap Timur lebih rendah. Namun saat orang Timur sendiri merasa inferior dari orang Barat (alias menjadi orientalis baru, neo-orientalis), maka ini merupakan hal yang sangat menyedihkan!

Syukurlah mindset orientalisme ini tidak dimiliki Si Pitung. Ia tidak menyerah pada kelemahan yang ditanamkan Barat (Belanda) pada kaum pribumi. Di zamannya, ia menggugat “normalitas” bahwa pribumi sudah seharusnya tunduk pada kuasa asing.

Beberapa cerita menyampaikan bahwa si Pitung adalah mitos, beberapa lainnya menyatakan bahwa ia adalah figur riil. Ada yang mengatakan ia jahat, ada pula yang mengatakan ia baik. Apapun argumentasinya, tidak bisa dipungkiri bahwa si Pitung berhasil tetap hidup di realitas masyarakat Betawi, khususnya, dan Indonesia pada umumnya, yang menandakan bahwa kita masih membutuhkan simbol-simbol pendobrak “normalitas” Barat. Refleksi ini muncul dalam 5 film yang diproduksi bertokohkan si Pitung: “Si Pitoeng” (1931), “Si Pitoeng” (1970), “Banteng Betawi” (1971), “Pembalasan si Pitung” (1977), dan “Si Pitung Bangkit Kembali” (1981). Pada tahun 1994, Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) masih menampilkan serial si Pitung setiap Selasa malam yang menurut Van Till (1996, p.470), cerita yang ditampilkan “were less pleasing to the Western eyes”.

Metode perumusan metodologi Si Pitung untuk membebaskan akuntansi yang dianggap “normal” namun telah menjebak penggunaanya dalam cara pandang pragmatis, dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, dilakukan kajian atas pandangan normalitas dan abnormalitas yang terpecah atas keberadaan si Pitung, serta relasinya dengan keadilan. Kedua, pemahaman atas normalitas dan abnormalitas realitas diturunkan ke dalam praktik akuntansi. Beberapa kajian tentang akuntansi yang dianggap “normal” dikritisi sebagai tahap awal pembebasan dari normalitas. Selanjutnya, sebuah tahapan teknis atau metode akhirnya dirumuskan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 “Normalitas” Keadilan: Si Pitung Sang “Bandit”

Dalam diskursus normalitas Belanda, si Pitung adalah bandit. Mengapa? Ya, tentu karena keberadaan si Pitung memberikan ancaman atau “... *threat it posed to the colonial government*” (Van Till, 1996, p. 462). Si Pitung mengancam sistem “normal” yang

telah dibangun Belanda, sehingga sebutan “bandit” pun dikenakan padanya.

Diceritakan bahwa si Pitung lahir di Pengumben, Rawabelong, di daerah dekat stasiun kereta api Palmerah. Bapakya bernama Bung Piung, dan ibunya Mbak Pinah. Nama asli si Pitung adalah Salihoen. Ia disekolahkan di pesantren Haji Naipin. Si Pitung berdagang kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, setelah berhasil menjual kambing ayahnya di Tanah Abang, uang Si Pitung dicuri. Kejadian ini akhirnya menyebabkan Si Pitung memutuskan untuk memiliki “... *criminal career*” (Van Till, 1996, p. 462).

Rumah yang pertama kali dirampok si Pitung adalah rumah Haji Safiudin, di Marunda, yang kini rumahnya menjadi Museum Si Pitung. Perampokan ini pun mungkin bisa dikatakan cukup ‘elegant’ karena mereka berpura-pura menjadi pegawai pemerintah, mendatangi Haji Safiudin dan mengatakan bahwa Haji Safiudin sedang dalam pemeriksaan karena pemalsuan uang, oleh karena itu uang Haji Safiudin harus dibawa ke kantor Demang untuk pemeriksaan. Dengan mulus, gang Si Pitung berhasil menggondol uang Haji Safiudin. Sejak itu si Pitung gemar merampok orang-orang kaya, hingga membuat gerah pihak yang berwajib. Koran Hindia Olanda tanggal 22 November 1892 dan 23 September 1893 menyebutkan bahwa si Pitung merampok kapal yang membawa sarung, seorang wanita pribumi bernama Mie, dengan menggunakan senjata berapi.

Polisi Belanda yang konon gencar mengincar si Pitung adalah Schout Heyne (orang Betawi memanggilnya Tuan Sekotena). Nama sebenarnya dari polisi ini adalah A.W.V. Hinne, seorang polisi Hindia Belanda yang ditugaskan di Betawi sejak 1888-1912. Si Pitung sempat tertangkap, namun berhasil kabur karena kesaktiannya. Bahkan setelah Si Pitung terbunuh karena peluru emas, makamnya dijaga karena kekhawatiran bahwa Si Pitung dapat hidup kembali (Van Till, 1996). Begitu takutnya Belanda akan kesaktian si Pitung, dikisahkan mayat si Pitung dimutilasi hingga beberapa bagian dan dimakamkan secara terpisah. Beberapa pihak tidak percaya bahwa Si Pitung benar-benar membagikan uang hasil rampokannya. Bagi mereka, perampok seperti si Pitung tidak akan pernah membagikan uangnya:

“Kalau menurut istilah sekarang, Pitung itu pengacau, dan dicari oleh Pemerintah. Pitung memang jahat. Pekerjaannya merampok dan memeras orang-orang kaya. Menurut kabar, hasil rampokannya dibagikan pada rakyat miskin. Namun sebenarnya

tidak. Tidak ada perampok yang rela membagi hasil rampokannya dengan cuma-cuma, bukan?” (Damardini 1993 dalam Van Till 1996, p. 464)

Testimoni ini diutarakan seorang pemain lenong yang mengaku memahami benar kisah Si Pitung. Tentu hal ini menarik, mengingat bahwa *mindset* Belanda bisa jadi akhirnya masuk ke dalam *mindset* orang Indonesia sendiri karena penanaman “normalitas” kebanditan Si Pitung. Dalam hal ini, saya memang tidak tahu apakah benar bahwa Si Pitung benar-benar merampok untuk dibagikan atau untuk diambilnya sendiri. Di sini saya memosisikan diri sebagai pihak anti-normalitas Barat (Belanda). Dari pencitraannya di film dan khususnya lenong bertokohkan si Pitung yang sering dimainkan dalam rentang tahun 1970-1990 (Setyaningrum, 2011) sebagai pahlawan, penolakan terhadap normalitas ini mungkin sudah sewajarnya.

Isu yang diangkat Si Pitung adalah isu keadilan. Dalam perspektif Belanda, si Pitung adalah cermin ketidakadilan. Betapa tidak, si Pitung sudah dengan semena-mena mengambil hak orang lain dengan merampok, apalagi jika itu ditujukan untuk kepentingannya sendiri. Dalam normalitas Belanda, Si Pitung adalah cermin ketidakadilan dengan pembangkangan terhadap sistem hukum yang berlaku.

4.2 “Abnormalitas” Keadilan: Si Pitung Sang “Robin Hood”

Di “abnormalitas” lain, si Pitung justru digambarkan sebagai “...*Betawi hero: he is loyal, a pious Muslim, and a champion of social justice*” (Koesasi 1992 dalam Van Till 1996). Bagaimana kemudian sanggahan para pro-Si Pitung pada klaim birokrasi orientalis sebelumnya?

Pertama, dalam rangka melakukan perampokan-perampokannya, Si Pitung dibantu oleh “geng”nya yaitu Dji’ih, Rais, dan Jebul. Kemungkinan besar, geng si Pitung tidak hanya tiga orang ini, karena kata si Pitung diambil dari *Pituan Pitulung* (tujuh yang saling menolong) yang selalu berpakaian yang sama untuk mengecoh musuh mereka (Van Till, 1996, p. 473). Turunan kata *pitulung* (menolong) inipun sebenarnya memberikan penegasan atas kebaikan hati si Pitung di balik aksi rampoknya.

Kedua, bagaimana dengan perampokan yang dilakukan si Pitung, khususnya perampokan pertama yang fenomenal di rumah Haji Saifudin? Begitu fenomenalnya perampokan tersebut, sehingga rumah Haji Saifudin kini menjadi Cagar Budaya di Marunda, dan dikenal sebagai Rumah Si Pitung (lihat Gambar

2). Menurut warga sekitar Marunda, ada versi “abnormalitas” lain “... bahwa Si Pitung dan Haji Saifudin sebenarnya berteman. Mereka sengaja bersepakat untuk membuat cerita mengenai perampokan tersebut agar tidak dicurigai oleh pihak Belanda” (Pertiwi 2011). Konon, Si Pitung memang pernah tinggal di situ untuk bersembunyi, walau tidak menetap. Menjadi wajar memang, bagaimana mungkin Si Pitung memiliki rumah permanen apabila ia adalah buron Belanda.

Gambar 2. Museum “Rumah Si Pitung” di Jalan Kampung Marunda Pulo, Cilincing



Sumber: talhagati.blogspot.com

Ketiga, jikalau ada perampokan-perampokan pada pribumi, maka mereka yang dirampok oleh Si Pitung adalah mereka yang kekayaannya didapatkan dengan memberatkan warga:

“Lukman Karmani, in the interview I had with him in 1994, further stated that there is a difference between stealing from the rich in the past and at the present. Formerly the rich were rich at the expense of the kampung (village, town quarter) people. These days, however, people derive their wealth from their own labour, according to him.” (Van Till, 1996, p. 467)

Dengan demikian, warga sekitar masih melihat si Pitung sebagai Robin Hood Indonesia (Belarminus 2014) yang berbaik hati membagikan hasil rampokannya ke masyarakat lemah. Beberapa gambar di beberapa laman internet menempatkan Si Pitung sebagai pahlawan rakyat (Gambar 3). Dari penelusuran saya, tidak ada satupun yang menempatkan si Pitung sebagai bandit masyarakat.

Gambar 3. Pencitraan si Pitung di Media Maya



Sumber: kolektor sejarah.wordpress.com, www.super-kidsindonesia.com

Terlebih, setelah kematiannya, simbol Si Pitung sebagai sosok resistensi atas kolonialisme Belanda masih dianggap hal yang membahayakan. Belanda membatasi masyarakat untuk berkunjung ke makamnya. Koran Hindia Olanda tanggal 20 Oktober 1893 menjelaskan:

“Yet Pitung was not forgotten, either. At some point, his grave seems to have shown signs of becoming a place of pilgrimage, and the colonial government had to place a military guard at it to prevent this.” (Van Till, 1996, p. 477)

Dalam diskusi ini, Si Pitung adalah cerminan keadilan yang diidamkan. Ini bukan keadilan versi normalitas Belanda, di mana “adil” didefinisikan dalam konteks birokrasi dan sistem yang didesain kuasa Belanda. Di sini, “adil” adalah abnormalitas yang diinginkan oleh masyarakat. Si Pitung adalah *Sang Outlier* yang mendobrak definisi “normal”, melakukan perubahan tidak untuk dirinya namun untuk masyarakatnya.

Mana dari dua “normalitas” yang Anda yakini benar? Bagaimana metafora Si Pitung dapat digunakan pada kajian akuntansi?

4.3 Akuntan(si) Pitung: Telaah Keadilan Praktik dan Pemikiran Akuntansi melalui Birokrasi

Akuntansi yang mana yang Anda anggap normal? Tentu jika kita mengambil asumsi para orientalis, maka yang dianggap “normal” di beberapa bidang di bawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Normalitas Diskursus Akuntansi

Ilmu/praktik akuntansi	Normalitas
Akuntansi Keuangan	Akuntansi berbasis IFRS
Akuntansi Sektor Publik	Akuntansi berbasis akrual
Akuntansi Manajemen	Activity Based Management-Costing
Perpajakan	Tax Planning/Avoidance
Akuntansi Pasar Modal	Agency Theory- Cost

Apa konsep keadilan yang diusung diskursus ini? Jika kita membicarakan konsep keadilan, mau tak mau kita perlu bicara teori etika. Diskursus akuntansi pada Tabel 1 di atas, berorientasi pada akar tujuan yang sama yaitu kepentingan diri korporasi di atas kepentingan masyarakat:

IFRS bertujuan untuk memudahkan perolehan modal (capital) melalui persaingan: *“By adopting IFRS, a business can present its financial statements on the same basis as its foreign competitors, making*

comparisons easier. Companies may also benefit by using IFRS if they wish to raise capital abroad" (www.ifrs.com).

Akuntansi sektor publik berbasis akrual untuk mempermudah transisi menuju pasar bebas (kapitalisme) (Mccartney & Arnold, 2012) dan mempermudah usaha privatisasi.

Activity Based Management, dan implikasinya Activity Based Costing, dilakukan untuk mengefisienkan biaya dan meningkatkan laba, sehingga meningkatkan nilai perusahaan (Kennedy & Affleck-Graves, 2001). *Tax planning/avoidance* membantu pemilik perusahaan menghindari pembayaran pajak berlebihan (Sikka, 2008).

Akuntansi pasar modal menggunakan Teori Keagenan dalam memandang fenomena pasar modal, dengan berasumsi bahwa manusia pada dasarnya rasionalis dan oportunistis (Merino, Mayer, & Tolleson, 1989).

Jika akuntansi "normal" demikian dikaitkan dengan Teori Etika yang ada, maka akuntansi cenderung menggunakan Teori Utilitarianisme; bahwa suatu tindakan dinyatakan etis/baik apabila tindakan tersebut lebih banyak memberikan manfaat (pada diri-Teori Egoisme) dibandingkan ketidakbermanfaatannya (*disutility*). Akuntansi pada akhirnya dianggap adil apabila ia memenuhi tujuannya, yaitu kebermanfaatannya bagi pemilik modal. Bagi selain pemilik modal, maka keadilan akan hanya menjadi mitos. Seandainya pun ia mendapatkan bagian, maka sama seperti konsep *academic racism*, bagiannya harus terdesain dalam kerangka kuasa pemilik modal². Ia tidak akan dapat tercapai selama akuntansi "normal" tetap digunakan.

Dengan perspektif ini pula, diskursus akuntansi yang menyimpang- katakan saja- akuntansi berbasis budaya (akuntansi Malang-an, Bali-an, Makassar-an), akuntansi spiritualitas, keindahan akuntansi, maka kajian ini menyimpang dari normalitas dan memperkuat *error* generalisasi normalitas. Mereka adalah *outliers* akuntansi, baik dalam pemikiran maupun akuntansi. Dengan menganggap kajian *non-mainstream* ini. Bukankah *mindset* ini sama dengan "normalitas" Belanda yang mengklaim bahwa Si Pitung adalah "bandit"? Dengan mengambil posisi abnormalitas Si Pitung sebagai

pahlawan bukan bandit, dan menolak pemikiran orientalis, maka kita terbebas dari penjara normalitas. Pada akhirnya, sebagaimana telah dije-laskan, Si Pitung "bandit" Belanda tetap dianggap sebagai pahlawan bagi masyarakat. Ia bermain strategi dengan Haji Safiudin untuk mengecoh Belanda, dan menyelamatkan Haji Safiudin dari incaran Belanda.

Diseminasi pemikiran akuntansi pun memerlukan strategi. Dalam rangka mengukuhkan eksistensi IFRS, misalnya, terlihat gurita kuasa antara perusahaan multinasional dan dewan standar untuk menekan kuasa pemerintah melalui kesepakatan pasar bebas. Bersiasat, sebagaimana yang dilakukan Si Pitung, diperlukan agar akuntansi "abnormal" dapat masuk ke dalam logosentrisme "normalitas" diskursus akuntansi. Metafora Si Pitung inilah yang dapat diturunkan sebagai metodologi dalam pengembangan akuntansi "lain":

- Menjelaskan bagaimana kajian akuntansi di bidang apapun yang diteliti sedang terjebak normalitas orientalis.
- Menelaah bagaimana keterjebakan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu melalui prosedur/birokrasi yang menekankan fungsionalitas semata dan bukan kemanusiaan. Perlu kajian relasi inter-organisasi pada praktik dan pemikiran akuntansi.
- Mengusulkan sebuah *outlier* kajian akuntansi serta strategi/siasat yang menguntungkan mereka yang tidak mendapat keadilan agar akuntansi tersebut bisa diterima. Keadilan yang dituju bukan keadilan bagi pihak terbatas, namun sebagaimana diajarkan agama "cintailah orang miskin"³, keadilan harus berbasis kebenaran agama.

5. Kesimpulan

Cerita Si Pitung mengajarkan beberapa kata kunci perlawanan pada ketidakadilan. *Pertama*, bahwa dengan menyadari bahwa "normalitas" adalah sebuah konsep yang bisa jadi didesain oleh penguasa orientalis (Barat maupun pribumi) untuk melanggengkan kekuasaannya adalah kunci pertama

³ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَابِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّعْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالشَّمْرَةُ وَالشَّمْرَتَانِ. قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَجِدُ عَنَى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ عَيْبٌ. فَيَنْصَنَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا. Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain agar diberikan sesuap dan dua suap makanan dan satu-dua butir kurma." Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, (kalau begitu) siapa yang dimaksud orang miskin itu?" Beliau menjawab, "Mereka ialah orang yang hidupnya tidak berkecukupan, dan dia tidak mempunyai kepandaian untuk itu, lalu dia diberi shadaqah (zakat), dan mereka tidak mau meminta-minta sesuatu pun kepada orang lain."

² Lihat, misalnya, kajian tentang CSR pada perbankan yang justru menempatkan stakeholder yang berkepentingan atas CSR pada informasi peripheral namun menguntungkan perbankan (Coupland, 2006).

untuk mendobrak penjara ketidakadilan. Perlu penyadaran bahwa “normalitas” yang dibangun berbasis rasialisme dalam konteks terkini (neo-rasialisme) baik dalam pemikiran maupun praktik. Paradigma Positivisme melanggengkan ilusi “normalitas” dengan asumsi keteraturan sosial dan bahwa realitas sosial dapat diukur secara objektif.

Kedua, keberadaan birokrasi berbasis fungsionalitas yang mereduksi manusia menjadi mesin, memperkuat normalitas yang dibangun penguasa. Keberadaan birokrasi ini perlu ditelaah secara kritis- dan membutuhkan pemahaman relasi inter-organisasi- berbasis telaah kepentingan. *Ketiga*, apapun usulan yang menjadi *outlier* normalitas orientalis membentuk normalitas baru yang membutuhkan siasat agar dapat diterima. Usulan-usulan yang “mendobrak” tidak mungkin dilahirkan dalam asumsi keteraturan. Perlu sebuah perombakan cara pandang dari positivisme menuju non positivisme, khususnya paradigma yang meyakini bahwa realitas sosial membutuhkan perubahan. Paradigma kritis dan postmodern memang mampu menawarkan emansipasi dan kemajemukan interpretasi realitas, namun membutuhkan peletakan nilai religius untuk mampu menghasilkan metodologi yang menghasilkan temuan yang bernilai kebenaran ilahiah.

Terlepas dari itu semua, pertanyaan yang perlu dijawab kembali sebelum Anda memulai perjalanan emansipatoris apapun adalah: normalkah Anda?

Semoga saja Anda termasuk mereka yang tidak “normal”, para pengubah dunia, para pewujud keadilan dalam normalitas Ilahiyah!

“Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid,
sepingtar-pintar siasat”
HOS. Tjokroaminoto

Daftar Rujukan

- Balibar, E. (2007). Is there a “neo-racism”? In T. Das Gupta, C. E. James, R. C. . Maaka, G. E. Galabuzi, & C. Andersen (Eds.), *Race and Racialization: Essential Readings*. Canada: Canadian Scholar Press.
- Bertens, H. (2005). *The Idea of The Postmodern: A History*. London, UK.: Taylor & Francis e-library.
- Boyce, G. (2008). The social relevance of ethics education in a global(ising) era: From individual dilemmas to systemic crises. *Critical Perspectives on Accounting*, 19(2), 255–290.
<http://doi.org/10.1016/j.cpa.2006.09.008>
- Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. Great Britain: Arena.
- Comte, A. (1896). *The Positive Philosophy of Auguste Comte* (Vol. 1). London: George Bells & Sons.
- Coupland, C. (2006). Corporate social and environmental responsibility in web-based reports: Currency in the banking sector? *Critical Perspectives on Accounting*, 17(7), 865–881.
<http://doi.org/10.1016/j.cpa.2005.01.001>
- Deutscher, I. (1969). Roots of Bureaucracy. *The Socialist Register*, 9–28.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. London, UK.: Aldine Transaction.
- Hanafi, H. (2008). From Orientalism to Occidentalism. In K. Henriksson & A. Kynsilehto (Eds.), *Building Peace through Intercultural Dialogue* (2nd ed., pp. 257–266). Finland: Institut de Recherche de la Paix à Tampere TAPRI.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1998). The Nature of Man. *Journal of Applied Corporate Finance*, 7(2), 4–19.
- Kennedy, T., & Affleck-Graves, J. (2001). The Impact of Activity-Based Costing Techniques on Firm Performance. *Journal of Management Accounting Research*, 13(1), 19–45.
<http://doi.org/10.2308/jmar.2001.13.1.19>
- Liotard, J., Bennington, G., & Massumi, B. (1984). *The Postmodern Condition: a Report on Knowledge* (Vol. 10). Manchester USA: Manchester University Press.
- Mccartney, S., & Arnold, A. J. (2012). Financial capitalism , incorporation and the emergence of financial reporting information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 25(8), 1290–1316.
<http://doi.org/10.1108/09513571211275489>
- Merino, B. D., Mayer, A. G., & Tolleson, T. G. (1989). *Neo Liberalism and Corporate Hegemony: A Framework of Analysis for Financial Reporting Forms in the United States*.
- Moore, W. (1966). Indoctrination as a normative conception (p. 1966). Southern Illinois University.
- Said, E. (2003). Orientalism. *The New York Times*, (1977), 1–234.
- Setyaningrum, A. (2011). *Dinamika Kesenian Lenong Betawi*. Universitas Indonesia.
- Sikka, P. (2008). Enterprise culture and accountancy

- firms: new masters of the universe. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(2), 268–295. <http://doi.org/10.1108/09513570810854437>
- Van Till, M. (1996). In Search of Si Pitung: The History of an Indonesian Legend. *Bijdragen Tot de Taal, Land En Volkenkunde*, 152, 461–482.
- Ward Randolph, a., & Weems, M. E. (2010). Speak Truth and Shame the Devil: An Ethnodrama in Response to Racism in the Academy. *Qualitative Inquiry*, 16(5), 310–313. <http://doi.org/10.1177/1077800409358864>
- Yamey, B. (1949). Scientific Bookkeeping and the Rise of Capitalism. *The Economic History Review*, 1(2), 99–113.